

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sapi potong merupakan salah satu komoditas subsektor peternakan yang berperan penting dalam penyediaan protein hewani bagi masyarakat. Permintaan daging sapi di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi. Menurut Nainggolan dkk. (2023), pemeliharaan sapi potong di tingkat peternak rakyat masih banyak menggunakan cara tradisional dengan kendala utama pada penyediaan pakan dan pengelolaan kesehatan, sehingga keberhasilan pengembangan usaha ternak sangat ditentukan oleh perbaikan manajemen pemeliharaan.

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan sapi potong karena didukung oleh kondisi agroekosistem dan ketersediaan sumber daya. Namun, kondisi populasi sapi potong dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 populasi sapi potong di Sumatera Barat tercatat sebanyak 415.454 ekor, naik menjadi 424.631 ekor pada tahun 2021, dan kembali turun menjadi 400.033 ekor pada tahun 2022. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah hanya 224.160 ekor, meskipun pada tahun 2024 mulai meningkat kembali menjadi 236.393 ekor (BPS, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan populasi sapi potong.

Beberapa faktor teknis sangat berpengaruh dalam pengembangan sapi potong, di antaranya bibit, pakan, kandang, tata laksana pemeliharaan, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Ardi dkk. (2025) menegaskan bahwa

kualitas bibit merupakan faktor krusial dalam usaha penggemukan, sementara manajemen intensif mencakup kandang, pakan, kesehatan, serta teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan menjadi kunci peningkatan produktivitas. Hal ini sejalan dengan penelitian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah (2022) yang menunjukkan bahwa penyediaan pakan tambahan di tingkat peternak rakyat dapat memperbaiki performa reproduksi sapi potong, khususnya pada ekosistem lahan kering.

Dalam mendukung peningkatan populasi dan produktivitas ternak, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya kelembagaan perbibitan dalam penyediaan ternak unggul. Kebijakan ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur pedoman pembibitan, pemeliharaan, dan distribusi bibit ternak unggul untuk menjamin mutu genetik serta keberlanjutan usaha peternakan.

Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis di Sumatera Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ternak Ruminansia Air Runding yang berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat. UPTD ini berfungsi sebagai pusat perbibitan dan pemeliharaan sapi potong unggul, serta menjadi tempat penelitian, pengembangan, dan pelatihan teknis bagi peternak maupun akademisi. Menurut Syamsuddin (2020), keberadaan UPTD menjadi sangat penting karena dapat berfungsi sebagai sentra percontohan penerapan manajemen pemeliharaan yang baik dan benar di tingkat daerah.

Pengelolaan peternakan sapi di Air Runding Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dimulai pada tahun 1982, dikelola ADP (Area Development Project), yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jerman. Kerja sama itu berjalan selama lima tahun, dengan jumlah sapi sebanyak 500 ekor dan areal seluas 2.000 Ha. Kemudian setelah kerja sama berakhir pada 1988, lahan tersebut diserahkan oleh Pemerintah Indonesia kepada Provinsi Sumbar. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, maka terjadi kemunduran yang menyebabkan seluruh sapi habis tak bersisa dan lahan tidak lagi dimanfaatkan.

Pada tahun 2001 lahan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan menguasai lahan secara sepihak untuk perkebunan sawit. Pada tahun 2006 lahir Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang penetapan peruntukan lahan peternakan tersebut dengan pembagian, masing-masing 500 Ha dialokasikan untuk PEMDA Propinsi dan PEMDA Kabupaten (Pasaman Barat), sisanya 1.000 Ha untuk masyarakat akan tetapi faktanya ketika itu seluruh lahan sudah dikuasai masyarakat.

Saat ini Pemprov Sumbar telah menguasai kembali seluas 20 ha lahan dari 500 ha peruntukan untuk Provinsi Sumbar, 480 ha lagi masih dikuasai masyarakat dan telah dijadikan kebun sawit. Jumlah ternak saat itu tercatat sebanyak 374 ekor, jumlah sapi yang dijual sejak 2016 sampai 2019 sebanyak 49 ekor dan semuanya masuk PAD Sumbar. Total PAD yang dihasilkan mencapai Rp.333,1 juta termasuk hibah kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 10 ekor. Jumlah ternak saat ini tercatat sebanyak 252 ekor (sapi Bali sebanyak 195 ekor

dan sapi Pesisir sebanyak 57 ekor), diharapkan dari sapi yang sekarang dapat menghasilkan bibit unggul.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Aspek Teknis Pemeliharaan Sapi Potong Di UPTD Ternak Ruminansia Air Runding, Sumatera Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana aspek teknis pemeliharaan di Unit Pelaksana Teknis Dasar (UPTD) Ternak Ruminansia Air Runding ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek teknis pemeliharaan sapi potong di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ternak Ruminansia Air Runding.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan informasi bagi UPTD Ternak Ruminansia Air Runding untuk mengembangkan usaha peternakan di masa yang akan datang.
2. Dapat menjadi acuan bagi pemerintah atau dinas terkait dalam merumuskan kebijakan mengenai usaha pengembangan sapi potong.
3. Referensi untuk penelitian selanjutnya .

